

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

¹Maya Sri Ismayani, ²Yus Darusman, ³Syaefuddin, ⁴Didik Kurniawan

^{1,2,3,4}Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi
srimaya785@gmail.com

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui; 1) implementasi Program Indonesia Pintar di LPK YUWITA Kota Tasikmalaya; 2) dampak Program Indonesia pintar terhadap warga belajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 5 informan pihak pimpinan lembaga dan warga belajar penerima PIP. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi Program Indonesia Pintar di LPK YUWITA Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan petunjuk teknis dari mulai sosialisasi, pengajuan berkas, penyeleksian sampai kepada penerimaan dana bantuan. 2) dampak program Indonesia Pintar terhadap warga belajar yaitu dari keaktifan kegiatan pembelajaran, keseriusan pembelajaran, keseriusan dalam belajar, kreativitas dalam belajar, prestasi belajar, disiplin warga belajar, kehadiran belajar, perilaku warga belajar sebelum dan sesudah mendapatkan PIP ini tidak ada dampaknya sama sekali apalagi rata-rata warga belajar di LPK YUWITA sudah bekerja. Kesimpulannya implementasi atau Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada kursus dan pelatihan tata kecantikan kulit di LPK Yuwita Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan petunjuk teknis.

Kata kunci: Implementasi, Program Indonesia Pintar, Kursus dan Pelatihan

ABSTRACT

Program Indonesia Pintar is a cash support from government to school-age children which is from underprivileged families and categorized with Kartu Indonesia Pintar (KIP) as a continuation of Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar is given to school-age children from underprivileged families that have Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) aimed to ensure all children can go to school. The purpose of this study is to find out; 1) the implementation of Program Indonesia Pintar in LPK YUWITA, Tasikmalaya; and 2) the impact of Program Indonesia Pintar towards learning citizens. The research method used in this study was qualitative research method. The data was collected through interview, observation, and documentation with 5 informants from the leader of the institution and PIP recipient. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of this study indicate that: 1) the implementation of Program Indonesia Pintar in LPK YUWITA, Tasikmalaya is accordance with the technical guidelines from the socialization, filling, and selection to the recipient. 2) the impact of Program Indonesia Pintar towards learning citizens from their activeness, seriousness, creativity, disciplinary, presence, and behavior of learning community before and after getting Program Indonesia Pintar has no impact at all, especially the average of the student at LKP YUWITA has worked. In conclusion, the implementation of Program Indonesia Pintar in course and training skin beauty in LPK YUWITA, Tasikmalaya is accordance with the technical guidelines.

Keywords: Implementation Program Indonesia Pintar, Course and Training

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan di dasar kan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin lebih mempertanggung jawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesame dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan.

Pendidikan merupakan pemotong mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan yang mencukupi seseorang dapat hidup layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia. Tentunya harapan manusia pada masa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan sekarang penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perperubahan pola hidup kepada peserta didik.

Menurut Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3a bahwa “Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan. Namun belum semua warga warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Mereka mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.

Upaya pemerintah untuk memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena siswa-siswa tersebut yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya putus sekolah.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Indonesia Pintar diharapkan tidak adalagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurang biaya. Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Dalam Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 diantaranya mengamatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Kepada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA. Dan siswa /warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional.

Salah satu lembaga kursus dan pelatihan di Kota Tasikmalaya yang melaksanakan PIP adalah LPK Yuwita Kota Tasimlaya. Peserta pelatihan yang mendapatkan PIP pada Tahap 1 sebanyak 15 orang. Program Indonesia Pintar ini batas usianya dari 6 sampai dengan 21 tahun. Sedangkan di tempat kursus dan pelatihan di LPK Yuwita rata-rata peserta didiknya itu sudah berumur dan kebanyakan sudah menikah dan bekerja. Jumlah peserta pelatihan apakah yang diusulkan sudah sesuai dengan kriteria dan ketentuan untuk memperoleh PIP atau tidak.

Penelitian ini penting dilaksanakan karena Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa yang mendukung pendidikan menengah universal atau pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota dan sekolah mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mengontrol implementasi Program Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan dengan pertimbangan banyaknya peserta pelatihan yang memperoleh beasiswa dan rekomendasi PIP dari dinas Pendidikan.

KAJIAN TEORI

Salah satu teori yang diambil dalam penelitian ini adalah teori motivasi, Pengertian Motivasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: “Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan yang dengan tujuan tertentu. Motivasi juga diartikan merupakan usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya” (Depdiknas, 2005: 756).

Macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik:

1) Motivasi Intrinsik

Yang dimaksud motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan belajar itu sendiri. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya.

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak mungkin ahli. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial.

2) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan dipuji oleh temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya ada aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar tetap penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar-mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmani seperti masalahnya: refleksi, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan.

METODE PENELITIAN

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2017:9) adalah:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen terkunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Latar belakang mengapa mengambil metode penelitian kualitatif ialah dalam buku sugiyono (2017:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi alamiah, disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut-sebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 5 informan pihak pimpinan lembaga dan warga belajar penerima PIP. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) (Pada Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Kulit di LPK YUWITA Kota Tasikmalaya).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilaksanakan di LPK YUWITA melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang dampak kepemilikan Program Indonesia Pintar peserta pelatihan Tata Kecantikan Kulit (TKK). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) (Pada Kursus dan Pelatihan di LPK YUWITA Kota Tasikmalaya). Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di atas di fokuskan kepada dua aspek pokok yaitu Implementasi program indonesia pintar dan dampak kepemilikan program indonesia pintar.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintah Jokowi-JK yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk memberikan bantuan secara tunai pada warga belajar miskin untuk

mendanai operasional sekolah, agar warga belajar miskin tersebut dapat terbantu dalam biaya sekolahnya dan mencegah warga belajar miskin tersebut untuk putus sekolah.

Presiden Republik Indonesia melalui Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah mengintruksikan kepada menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan istritusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan program Indonesia pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi ana usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah anatr kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibanding dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain, iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Program Indonesia Pintar ini diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa atau warga belajar putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan agar mendapatkan layanan pendidikan. PIP ini bukan hanya untuk peserta didik di sekolah, namun berlaku juga bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan termasuk Lemabaga Kursus Pelatihan (LKP/LPK) Yuwita Kota Tasikmalaya.

Dalam juknis PIP di jelaskan bahwa Petunjuk teknis, Program Indonesia Pintar diawali dengan sosialisasi dari pihak direktorat teknis selaku pihak pelaksana kepada dinas pendidikan Provinsi, kemudian dinas pendidikan provinsi mensosialisasikan PIP kepada seluruh Kabupaten/Kota dan masyarakat di wilayahnya, kemudian pihak kabupaten /kota menyampaikan informasi kepada sekolah-sekolah. Lalu pihak sekolah yang menginformasikan kepada siswa mengenai Syarat dan ketentuan Program Indonesia Pintar. Jadi dari pertanyaan penelitian (1) bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar , (2) Dampak kepemilikan program Indonesia Pintar yaitu adanya tahap-tahap seperti sosialisasi dari pihak dinas pendidikan, sampai dengan penerimaan dana PIP serta monitoring dan evaluasi. Dan juga implementasi Program Indonesia Pintar dilihat dari keaktifan belajar, keseriusan dalam belajar,

disiplin belajar, kehadiran belajar, kreativitas dalam belajar, prestasi belajar, perilaku warga belajar sebelum dan sesudah menerima PIP tidak adanya dampak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Program Indonesia Pintar berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar dilembaga kursus dan pelatihan LPK YUWITA tersebut telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang terdapat dalam petunjuk teknis Program Indonesia Pintar. Hal ini dapat dilihat mulai dari sosialisasi Program, dimana pihak lembaga memberikan informasi kepada seluruh warga belajar mengenai Program Indonesia Pintar ini, seperti memberikan informasi tentang persyaratan PIP sampai penerimaan dana PIP tersebut telah sesuai. Dalam juknis PIP di jelaskan bahwa Petunjuk teknis, Program Indonesia Pintar diawali dengan sosialisasi dari pihak direktorat teknis selaku pihak pelaksana kepada dinas pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi, mensosialisasikan PIP kepada seluruh Kabupaten/Kota termasuk kota Tasikmalaya dan masyarakat di wilayahnya, kemudian pihak dinas kota Tasikmalaya menyampaikan informasi kepada lembaga-lembaga. Lalu pihak lembaga yang menginformasikan kepada warga belajar mengenai Syarat dan ketentuan Program Indonesia Pintar sampai dengan penerimaan dana PIP. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam mengkomunikasikan PIP kebijakan harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi.

Dari pertanyaan penelitian sebelumnya Dampak Program Indonesia Pintar hasil penelitian dan pembahasan bahwa dampak program Indonesia Pintar di LPK YUWITA yaitu tidak adanya dampak terhadap warga belajar serta terhadap keaktifan kegiatan pembelajaran, keseriusan dalam belajar warga belajar, kreativitas dalam belajar warga belajar, prestasi belajar warga belajar, disiplin belajar warga belajar, kehadiran belajar, perilaku warga belajar sebelum dan sesudah mendapatkan PIP. Hal ini dikarenakan program Indonesia Pintar di LPK Yuwita hanya berjalan satu kali saja tidak berkelanjutan. Warga belajar atau peserta pelatihan hanya mengikuti pelatihan sampai level dua saja. Tidak ada kelanjutan lagi dari pihak dinas ataupun pemerintah dan di peserta pelatihan di LPK Yuwita yang mendapatkan PIP rata-rata sudah bekerja jadi tidak adanya dampak PIP terhadap warga belajar

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Bagi pemerintah, perlunya pemberian terus menerus secara bertahap tidak hanya satu kali saja karena tanggung mereka hanya bisa mengikuti pelatihan di LPK YUWITA sampai level 2 saja. Peserta pelatihan perlu lagi mengikuti pelatihan sampai level 3 dan selanjutnya. Jadi diharapkan untuk dinas pendidikan agar melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kepada direktorat teknis untuk mengalirkan dana PIP tersebut.

- b) Bagi pihak lembaga, hendaknya melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan atau pemanfaatan dana sehingga tidak adalagi penyalahgunaan pemanfaatan dana, baik yang dilakukan pihak lembaga atau pihak penerima program.
- c) Bagi penerima program, diharapkan untuk tidak menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain diluar kebutuhan untuk pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Mustofa Kamil. (2010) *Model Pendidikan dan Pelatihan (konsep dan aplikasi)*. Bandung: Alfabeta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sardiman A.M, (2007). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Slameto, (2015) *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

http://ninanurse.blogspot.com/2013/01/keseriusan-belajar_31.html?m=1
[online 31-01-2019]

<http://eprints.uny.ac.id> [online 31 01-2019]

([http://www.jabarprov.go.id/index.php p/pages/id/1065](http://www.jabarprov.go.id/index.php/p/pages/id/1065)). (online 01-01-2019)

<https://Tasikmalayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/90> (online 01-01-2019)

(http://www.Tasikmalayakota.go.id/s_tatis-250-industri.html) (online 01-01-2019)

<https://Tasikmalayakota.bps.go.id/linkTabelStatis/excel/id/15> (online 01-01-2019)